



Peran Kepemimpinan Dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi di Era Digitalisasi 5.0 Dan Sosial Media

Dwi Ajeng Maulidya Makalao

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

ajengmakalao16@gmail.com

Harry Z Soeratin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

hzss@kemenkeu.go.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran kepemimpinan dalam mengatasi korupsi di era digitalisasi 5.0 dan media sosial. Penelitian ini juga akan membahas tantangan penanganan korupsi di era digitalisasi dan bagaimana kepemimpinan dapat menghadapinya. Penelitian kualitatif deskriptif analitik dokumen untuk menjelaskan situasi yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dokumen atau teks. Metode dan teknik ini digunakan untuk mengkaji tingkat keterbacaan teks-teks yang terkait dengan topik 'Peran Kepemimpinan dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi di Era Digitalisasi 5.0 dan Media Sosial'. Kepemimpinan yang efektif dan berintegritas penting dalam mengatasi korupsi di era digitalisasi 5.0 dan media sosial. Kepemimpinan yang kolaboratif dan inklusif dapat membangun kerjasama yang baik untuk mengatasi korupsi.

Kata kunci: Kepemimpinan; Korupsi; Digitalisasi 5.0

Abstract

The role of leadership in accelerating the handling of corruption in the era of digitalization 5.0 and social media. This research explores the role of leadership in addressing corruption in the era of digitalization 5.0 and social media and discusses the challenges and potential solutions. The objective of the research is to understand the role of leadership in addressing corruption in the era of digitalization 5.0 and social media and to discuss the challenges and potential solutions. The

research methods used are a qualitative descriptive analytical document study to explain the situation being studied and document or text analysis to assess the readability of texts related to the topic. Key findings are not presented in the text. The significance of the research is to provide insights into how effective and integrity-based leadership, as well as collaborative and inclusive leadership, can help address corruption in the era of digitalization 5.0 and social media.

Keywords: leadership; corruption; digitalization 5.0

Pendahuluan

Era Digitalisasi 5.0 saat ini ditandai oleh perkembangan teknologi yang pesat, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *Internet of Things* (IoT), big data, dan komputasi awan. Transformasi digital ini telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pemerintahan dan administrasi publik. Namun, bersamaan dengan kemajuan ini juga muncul tantangan baru, termasuk korupsi yang semakin kompleks dan tersembunyi. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami peran kepemimpinan dalam mengatasi masalah korupsi di era digitalisasi 5.0. Pada dasarnya, kepemimpinan yang efektif dan berintegritas memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi korupsi. Seorang pemimpin yang visioner, tegas, dan berkomitmen dapat memberikan arah yang jelas bagi organisasi atau negara dalam upaya penanganan korupsi. Namun, dengan adanya digitalisasi dan media sosial, peran kepemimpinan tersebut perlu diperbarui dan disesuaikan dengan konteks baru. Kepemimpinan di era digitalisasi 5.0 harus mampu memahami dan mengadaptasi teknologi yang berkembang dengan cepat untuk mendukung upaya penanganan korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Selain itu, kepemimpinan di era digitalisasi 5.0 juga harus mampu bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama dalam memerangi korupsi. Kolaborasi ini memungkinkan sinergi dan pemanfaatan sumber daya yang lebih besar untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian, peran kepemimpinan dalam mengatasi masalah korupsi di era digitalisasi 5.0 sangat penting. Kepemimpinan yang efektif dan berintegritas harus mampu memahami dan mengadaptasi teknologi yang berkembang dengan cepat serta bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama dalam memerangi korupsi. Tantangan penanganan korupsi di era digitalisasi dan media sosial juga perlu diperhatikan. Digitalisasi memberikan kemudahan akses dan kecepatan dalam melakukan transaksi keuangan secara elektronik. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk melakukan

praktik korupsi seperti pencucian uang dan pengolahan data. Selain itu, media sosial memainkan peran penting dalam penyebaran informasi dan membentuk opini publik. Oleh karena itu, penyebaran informasi yang tidak akurat atau terdistorsi melalui media sosial dapat mempengaruhi dinamika politik dan mempersulit upaya penanganan korupsi. Untuk mempercepat penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan media sosial, pemimpin perlu memiliki pemahaman dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi. Dalam hal ini, penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan analisis big data menjadi faktor penting. Pemimpin yang mampu menggunakan teknologi ini akan memiliki keunggulan dalam mengidentifikasi pola-pola korupsi dan mengambil tindakan yang tepat. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pemimpin dapat lebih efektif dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak tindak korupsi. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal dalam penanganan korupsi, penting adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemimpin harus mampu membangun kemitraan yang kuat dan memobilisasi semua pihak terkait untuk bekerja bersama dalam memerangi korupsi secara efektif. Kolaborasi ini memungkinkan berbagi sumber daya, pengetahuan, dan keahlian dalam menggunakan teknologi untuk mengatasi korupsi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mengembangkan solusi teknologi yang lebih baik dan efisien. Selain itu, kolaborasi ini juga memperluas jangkauan dan upaya antikorupsi melalui partisipasi aktif masyarakat dalam memerangi korupsi.

Peran kepemimpinan yang memanfaatkan teknologi dalam mengatasi korupsi di era digitalisasi 5.0 dan media sosial sangat penting. Dalam era ini, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan akses informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam memerangi korupsi. Kolaborasi ini memungkinkan sinergi dan pemanfaatan sumber daya yang lebih besar. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan teknologi yang dapat membantu dalam memerangi korupsi. Sementara itu, masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan untuk perbaikan. Selain itu, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Melalui media sosial, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan keluhan dan aspirasinya kepada pemerintah.

Hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peran kepemimpinan yang memanfaatkan teknologi dalam mengatasi korupsi di era digitalisasi 5.0 dan media sosial sangat penting. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat membantu mencapai tujuan bersama dalam memerangi korupsi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat tiga rumusan masalah berikut: 1) Bagaimana peran kepemimpinan yang efektif dan berintegritas dalam mengatasi korupsi di era digitalisasi 5.0 dan media sosial?. 2) Bagaimana peran kepemimpinan dalam institusi Anda dalam mengakselerasi penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan media sosial?. 3) Apa tantangan utama dalam penanganan korupsi yang muncul seiring dengan perkembangan digitalisasi dan media sosial, serta bagaimana kepemimpinan dapat menghadapinya?. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1) Memahami pentingnya kepemimpinan yang efektif dan berintegritas dalam menangani korupsi di era digitalisasi 5.0 dan media sosial, 2) Menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang peran kepemimpinan dalam institusi dalam mengatasi korupsi di era digitalisasi 5.0 dan media sosial, 3) Mengetahui tantangan yang dihadapi dalam penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan media sosial.

Kajian Teori

Kepemimpinan

Seorang pemimpin adalah individu yang mampu memengaruhi dan memimpin orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka memiliki karakteristik unik seperti kecerdasan, kepribadian, kebijaksanaan, diplomasi, nilai-nilai pribadi dan profesional, serta kemampuan untuk mengembangkan organisasi. Kepemimpinan dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik di organisasi besar maupun kecil, sektor publik atau swasta, serta di lingkungan sosial, rumah tangga, sekolah, dan komunitas. Konsep kepemimpinan sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun demikian, terdapat beberapa referensi yang dapat digunakan untuk menentukan konsep dasar kepemimpinan (Gaol, 2020).

Bass (1980) mendefinisikan seorang pemimpin sebagai individu yang memiliki tujuan dan bekerja sama dengan anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan tersebut. Robbins (2006) menggambarkan kepemimpinan sebagai

kemampuan untuk mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan. Robert dan Hunt (1991) menjelaskan kepemimpinan sebagai cara mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka memiliki keinginan kuat dan antusias untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan dianggap sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja organisasi dan merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi (Yukl, 1989). Saat ini, literatur kepemimpinan juga mulai membahas tentang kepemimpinan spiritual yang mengandalkan kecerdasan spiritual dalam memimpin. Spiritualitas erat kaitannya dengan hati nurani. Pemimpin yang memiliki hati nurani tidak hanya mengatur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian berdasarkan rasionalitas semata untuk mencapai tujuan, tetapi juga akan memimpin organisasi menjadi lebih bijaksana dan berusaha meminimalkan gejala yang berpotensi memicu kerusuhan sosial (Verawati, Hartono & Siharis, 2019)

Kepemimpinan dalam perspektif Islam memiliki arti dan makna yang luas. Salah satu contoh dari kepemimpinan sesuai hukum dan syariat Islam adalah khilafah, yang merupakan sistem pemerintahan Islam yang diterapkan pada awal kejayaan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan merupakan sistem pemerintahan yang paling populer. Pada zaman tersebut, Islam dianggap sebagai ideologi dan syariat dianggap sebagai dasar hukum. Walaupun pada tiap-tiap negara mempunyai penamaan dan struktur yang berbeda, namun permanen dalam satu prinsip yang sama dan mencangkup kepemimpinan umat Islam pada semua dunia. Dalam ajaran Islam, seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan moralitas dalam kehidupannya. Mereka harus memiliki sifat-sifat seperti keluhuran hati dan jiwa, rendah hati, jujur, tidak suka penindasan dan kekerasan, pemaaf, penuh kasih sayang dan dapat dipercaya. Kepemimpinan dalam Islam merupakan ketetapan Allah SWT yang menjadikan manusia sebagai pemimpin yang amanah dan jujur. Semua orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat sesuai dengan konsep *Khalifatullah* yang diberi tugas untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah:30. (Hafiz Sandeq Yusuf, 2022)

Terdapat tiga teori utama tentang kompetensi kepemimpinan yaitu teori sifat, teori perilaku, dan teori lingkungan. Ketiga teori ini merupakan teori utama kepemimpinan yang dapat dijelaskan lebih lanjut :

1. Teori genetik atau sifat menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah bakat yang diwariskan, bukan hasil yang dikembangkan. Menurut teori ini, ciri bawaan tertentu seperti kebugaran fisik, keterampilan sosial, dan

kecerdasan dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang adalah seorang pemimpin. Teori ini mendalilkan bahwa kepemimpinan membutuhkan ciri-ciri tertentu untuk memastikan kesuksesan dalam situasi apa pun, dan bahwa kesuksesan seorang pemimpin terletak pada kepribadiannya.

2. Teori perilaku menjelaskan bagaimana Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dapat melaksanakan tugas, berkomunikasi secara efektif, dan memotivasi orang lain. Menurut teori ini, kapabilitas perusahaan tidak terbatas pada kompetensi intinya, tetapi juga dapat dipelajari dan dikembangkan melalui keterlibatan dan kesuksesan karyawan. Teorema ini menekankan pentingnya memandang pemimpin sebagai individu yang mengevaluasi sifat atau karakteristik pribadinya. Oleh karena itu, kesuksesan seseorang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.
3. Menurut teori lingkungan, seseorang lahir karena waktu, tempat, dan individu yang tepat. Secara teori, kesuksesan seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka bekerja dan jenis usaha yang dijalankan. Seorang pemilik bisnis harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan keadaan bisnisnya. Teori tujuan menjelaskan bagaimana seorang pemimpin dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan dalam berbagai situasi. Ada tiga jenis kepemimpinan dalam teori ini: kepemimpinan langsung, kepemimpinan suportif, kepemimpinan partisipatif, dan kepemimpinan yang berfokus pada kinerja.
4. Teori kepemimpinan mengimplikasikan keyakinan dan asumsi tentang karakteristik pemimpin yang efektif. Teori ini memungkinkan penggunaan stereotip dan arketipe untuk menggambarkan keterampilan atau sifat perilaku yang terkait dengan perbedaan antara berbagai jenis pengusaha. Faktor sosial dan budaya juga berkontribusi terhadap kewirausahaan yang efektif.
5. *The Great Man Theory* menjelaskan bahwa seorang pemimpin hebat dilahirkan dengan ciri-ciri kepribadian unik yang membedakannya dari kebanyakan orang lain, seperti karisma, kecerdasan, dan kemampuan menggunakan kekuasaan untuk membuat keputusan yang berdampak besar.
6. Teori Transformasional menjelaskan tentang perilaku kepemimpinan dimana seorang pemimpin yang dikategorikan sebagai pemimpin transformasional

menginspirasi sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai sesuatu yang melebihi apa yang direncanakan organisasi. Transformasi pemimpin adalah pemimpin visioner yang mengajak sumber daya manusia organisasi untuk bergerak menuju visi yang dimiliki pemimpin. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, pemimpin transformasional lebih cenderung dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai-nilai mereka.

7. Teori Karismatik Baru adalah teori kepemimpinan dengan penekanan pada simbolisme yang kuat, daya tarik emosional yang menggoda, dan dedikasi pengikut yang luar biasa.
8. Teori kepemimpinan karismatik mengklaim untuk mengevaluasi kemampuan kepemimpinan heroik pemimpin mereka berdasarkan perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin tersebut. (Syahril, 2019)

Seorang pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan untuk memimpin atau mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan tertentu (Abeng, Pawero, & Ramli, 2021). Ada berbagai teori yang menjelaskan tentang kepemimpinan, termasuk teori sifat, teori perilaku, teori lingkungan, teori implisit, teori Great Man, teori Transformasi, teori Neokharismatik dan teori kepemimpinan kharismatik. Menjadi pemimpin masa depan menuntut kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian dan perubahan yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan menjadi faktor penting dalam menghadapi dunia yang terus berkembang dengan cepat.

Peran Kepemimpinan

Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas hasilnya. Jika seorang pemimpin tidak dapat mengambil keputusan, maka dia tidak layak menjadi seorang pemimpin. Mencerminkan karakter pemimpin. Oleh karena itu, keputusan baik atau buruk tidak hanya dinilai setelah konsekuensinya, tetapi juga melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. Pengambilan keputusan adalah bentuk kepemimpinan berdasarkan pemahaman tentang apa yang melibatkan pengambilan keputusan: teori keputusan sebagai metodologi yang digunakan untuk membingkai dan menganalisis situasi yang tidak pasti atau berisiko, manajer/pemimpin mentransfer jawaban melalui proses mental memperoleh dan menggunakan data dengan mengajukan pertanyaan lain Proses menemukan informasi yang relevan dan

menganalisis data untuk memilih di antara alternatif tindakan untuk memecahkan masalah. (Dewi, 2006)

Selain itu, peran kepemimpinan dalam membangun tim sangatlah penting. Tim adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dari suatu organisasi atau masyarakat. Anggota tim memiliki keterampilan yang saling melengkapi, berkomitmen pada visi dan misi yang sama, dan bergantung satu sama lain untuk kinerja yang baik. Membangun tim yang solid adalah tujuan utama dari *team building*. Ini melibatkan identifikasi keanggotaan dan kerjasama yang kuat di antara anggota. Beberapa pedoman umum untuk membangun tim meliputi: a) menanamkan kepentingan bersama; b) menggunakan ritual dan upacara; c) menggunakan simbol untuk mengembangkan identitas dengan unit kerja; d) mendorong interaksi sosial yang memuaskan; e) mengadakan pertemuan untuk membentuk tim; f) Libatkan konsultan bila perlu (Jamaluddin, 2006). Oleh karena itu, peran kepemimpinan dalam mengatur sebuah tim menjadi sangat penting dalam membangun sebuah organisasi.

Peran manajer mungkin terkait dengan status dan otoritasnya serta perkembangan hubungan interpersonal. Aktivitas yang sering dilakukan dalam peran ini antara lain aktivitas ritual yang berhubungan dengan posisi manajerial (Thoha, 2007). Menurut Mintzberg, peran manajer dapat dipecah menjadi tiga: (a) manajer mewakili organisasi pada setiap kesempatan dan masalah yang muncul secara formal; (b) pemimpin, di mana manajer menjalankan kepemimpinan dengan menjalin hubungan interpersonal dengan bawahan (c) Pejabat, manajer berinteraksi dengan teman, karyawan, dan orang lain di luar organisasi untuk mendapatkan informasi (Bashori, 2020)

Korupsi

Korupsi adalah masalah yang sering terdengar di Indonesia dan sering diungkapkan oleh media massa. Korupsi melibatkan banyak orang, tidak hanya pejabat dan pengusaha tetapi juga orang-orang yang terlibat dalam lembaga sosial dan keagamaan. Korupsi bisa terjadi di mana saja dan kapan saja jika ada peluang kurangnya penilaian dan komitmen terhadap sesuatu dapat menyebabkan praktik korupsi. Korupsi juga dapat terjadi selama interaksi sosial di tingkat akar rumput atau di organisasi yang lebih kecil seperti RT, RW, Dusun, dan Kampung. perilaku pegawai yang menyimpang dari norma-norma yang diterima masyarakat dengan tujuan untuk mencapai prestasi diri sendiri. Korupsi juga dapat terjadi dalam bentuk

tindakan yang membutuhkan waktu untuk memperbaiki tindakan dan birokrasi. Hubungan antara korupsi dan hukum cukup kompleks (Hidayanto, 2005)

Korupsi dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dalam ilmu kejahatan dan hukum, korupsi dianggap sebagai tindakan yang merugikan keuangan dan perekonomian suatu negara. Baik di tingkat internasional maupun di Indonesia, upaya bersama telah dilakukan untuk memberantas praktik korupsi. Hal ini tercermin dalam penandatanganan deklarasi pemberantasan korupsi di Lima, Peru pada tahun 1997. Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "corruptus", yang berarti kerusakan atau kebejatan moral. Dalam bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai perbuatan buruk, seperti penyalahgunaan keuangan atau penerimaan suap. Pendekatan terhadap masalah korupsi dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang, seperti sosial, normatif, politik, atau ekonomi. Dalam konteks kebijakan, korupsi merupakan ancaman yang merusak kredibilitas pemerintah. Dari segi ekonomi, korupsi merupakan faktor biaya tinggi yang merugikan negara dan masyarakat. Secara kultural, korupsi merusak moral dan karakter bangsa yang seharusnya memiliki nilai-nilai luhur. Dalam UU No.31 Tahun 1999 dan UU No.20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau perusahaan, dan cenderung merugikan keuangan dan perekonomian negara. (Sofyanoor, 2022)

Terjadinya korupsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaan atau peluang yang dimilikinya berdasarkan jabatan atau kedudukan, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain, yang pada akhirnya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Teori Penipuan Pentra yang diusulkan oleh Crowe Horwarth pada tahun 2011 menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan korupsi, yaitu kompetensi, kesempatan, tekanan, rasionalisasi, dan arogansi. Faktor kompetensi mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengabaikan kontrol internal dan memanipulasi situasi sosial demi keuntungan pribadi. Sedangkan arogansi adalah sikap merasa lebih unggul dan tidak terikat oleh kontrol internal atau kebijakan perusahaan. Dua faktor ini menjadi ciri khas dari teori Penipuan Pentra yang membedakannya dari teori penipuan lainnya. (Gunawan, 2020).

Penanganan Korupsi

Penanganan korupsi merupakan langkah yang diambil untuk mencegah, mengungkapkan dan menindak tindakan korupsi. Langkah ini melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan dan kepolisian, serta masyarakat sipil dan media. Dalam hal ini, sangat penting bagi pimpinan KPK untuk memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan dan risiko yang ada. Keberanian ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengambil tindakan yang tepat meskipun menghadapi risiko atau ancaman. Pimpinan KPK harus berani menegakkan hukum secara adil dan tidak pandang bulu, meskipun hal tersebut dapat menimbulkan konflik atau ancaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi. Keberanian ini juga mencakup kemampuan untuk berbicara secara terbuka dan jujur tentang masalah korupsi serta mengekspos praktik-praktik korupsi yang terjadi.

Kemampuan KPK harus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi agar mampu mendeteksi dan memecahkan kasus korupsi yang semakin rumit transaksinya. Upaya untuk meningkatkan kemampuan KPK dapat mencakup pengembangan teknologi dan sistem informasi yang dapat membantu mendeteksi dan memecahkan kasus korupsi. Hal ini dapat mencakup penggunaan teknologi canggih seperti *data mining*, *machine learning*, dan *artificial intelligence* untuk menganalisis data dan mendeteksi pola-pola yang mencurigakan.

Terdapat beberapa kendala yang harus diatasi secara bersama oleh semua pihak agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan efektif. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia antara lain meliputi kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara KPK dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Dengan demikian, dalam upaya penanganan korupsi di Indonesia, penting bagi pimpinan KPK untuk memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan serta risiko yang ada. Selain itu, kemampuan KPK harus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi agar mampu mendeteksi dan memecahkan kasus korupsi yang semakin rumit transaksinya.

Untuk mengetahui penyebab utama terjadinya korupsi secara besar-besaran, perlu dilakukan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang menyebabkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak berhasil. Melihat masalah ini

secara terpisah hanya akan menimbulkan kesalahan penilaian terhadap lembaga tertentu yang dianggap tidak mampu menjalankan tugas negara dalam memberantas korupsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam mencegah dan memberantas korupsi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang dikemukakan oleh (Faiki, 2021) dalam tulisannya yaitu :

1. Faktor Hukuman (*Punishment Factor*), Menurut Rahantoknam (2013), faktor hukuman yang ringan tidak menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi dan mereka yang berniat melakukannya. Hal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kegagalan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, hukuman yang berat seperti hukuman mati harus dibuat dan diterapkan. Banyak pihak menginginkan koruptor dijatuhi hukuman mati karena penjara tidak memiliki efek jera bagi pelaku dan calon pelaku. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengakomodasi hukuman mati di Indonesia. Namun, pemerintah belum berani menerapkan hukuman mati secara eksplisit (Leasa, 2020). China, Malaysia, dan Singapura telah berhasil mengurangi jumlah korupsi dengan menjatuhkan hukuman mati kepada penjahat korupsi. Pemimpin negara-negara tersebut sangat mendukung pelaksanaan hukuman mati (Tampubolon, 2016).
2. Faktor Politik (*Politic Factor*), Faktor politik bisa menjadi penyebab korupsi, terutama ketika terdapat ketidakstabilan politik dan kepentingan politik dari pemegang kekuasaan. Perilaku korup seperti suap dan politik uang sering terjadi. Terrence Gomes (2000) menjelaskan bahwa politik uang menggunakan uang dan keuntungan materi dalam mengejar pengaruh politik. Susanto mengatakan, korupsi di tingkat pemerintahan meliputi penyuapan, pemerasan, perlindungan, pencurian barang publik untuk keuntungan pribadi, termasuk korupsi yang disebabkan oleh kekuatan politik. De Asis menambahkan bahwa korupsi politik mencakup kecurangan dalam pemilihan legislator atau pejabat eksekutif, pendanaan ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen dengan cara ilegal, dan teknik lobi yang tidak ortodoks (Abiansyah, 2019).
3. Faktor Hukum (*Legal Factor*), Faktor hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari aspek perundang-undangan dan kelemahan penegakan hukum. Substansi hukum yang buruk dalam peraturan yang diskriminatif dan tidak adil dapat menimbulkan banyak interpretasi, bertentangan dan tumpang tindih dengan aturan lain. Sanksi yang tidak setara dengan tindakan yang dilarang sehingga

tidak tepat sasaran dan dianggap terlalu ringan atau terlalu berat. Hal ini memungkinkan peraturan tidak sesuai dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami perlawanan. Penyebab situasi ini sangat beragam. Namun yang dominan adalah tawar-menawar dan memperjuangkan kepentingan antara kelompok dan kelompok di parlemen, menimbulkan peraturan yang bias dan diskriminatif serta praktik politik uang dalam pembuatan undang-undang dalam suap politik. Susila mengatakan bahwa tindakan korupsi mudah muncul karena ada kelemahan dalam undang-undang dan peraturan, termasuk adanya undang-undang dan peraturan yang mengandung kepentingan pihak tertentu, kualitas undang-undang dan peraturan yang tidak memadai, peraturan yang tidak disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan tidak adil serta bidang evaluasi dan revisi undang-undang dan peraturan yang lemah. Rahman Saleh merinci empat faktor dominan yang menyebabkan korupsi merajalela di Indonesia: faktor penegakan hukum, mental aparat, kesadaran publik rendah, dan kemauan politik rendah. Masyarakat hanya menikmati sisa hasil pembangunan dengan kemampuan melobi kelompok kepentingan dan pengusaha terhadap pejabat publik dengan menggunakan suap, hadiah, hibah, dan berbagai bentuk penawaran dengan motif korup (Cahyana, 2020). Basyaib et al. (2020) mencatat bahwa kelemahan sistem hukum memberikan kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selain produk hukum yang buruk yang dapat menyebabkan korupsi, praktik penegakan hukum masih terjerat dengan berbagai masalah yang menjauhkan hukum dari tujuannya.

4. Faktor Ekonomi (*Economic Factor*), Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi yang dapat dijelaskan dengan tidak adanya pembatalan pembayaran atau gaji. Namun, menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, individu harus memenuhi dua kebutuhan yang berbeda. Namun, korupsi kini dilakukan oleh mereka yang berpendidikan tinggi. Hidayah (2018) menegaskan bahwa gaji yang tidak ditentukan dan petugas publik adalah faktor yang paling merusak dalam proses keperawatan di Indonesia. Schoorl menyatakan bahwa di Indonesia selama sepuluh tahun pertama, situasinya sangat buruk sehingga gaji sebulan hanya cukup untuk makan dua minggu bagi kelompok pekerja terbesar. Dalam situasi seperti ini berbahaya bagi pemerintah untuk terus mencari bantuan dan banyak yang mencarinya dengan meminta uang. KPK juga menyebutkan dalam buku Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah bahwa sistem penggajian pegawai sangat erat kaitannya dengan pejabat

pemerintah. Tingkat upah yang tidak memenuhi tingkat penghidupan minimum pekerja merupakan masalah kompleks yang harus diringankan. Pejabat pemerintah yang merasa penghasilannya tidak sebanding dengan kontribusinya dalam melaksanakan tugas pokoknya secara optimal.

5. Faktor Organisasi (*Organizational Factor*), Organisasi dalam arti luas, yaitu sistem organisasi lingkungan masyarakat, merupakan faktor organisasi dalam hal ini. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau koruptor berkontribusi terhadap korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. Jika suatu organisasi tidak memberikan insentif bagi seseorang untuk melakukan kecurangan, maka kecurangan tidak akan terjadi. Aspek-aspek yang mengarah pada korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi kepemimpinan yang kurang teladan, budaya organisasi yang kurang baik, sistem akuntabilitas yang tidak memadai di lembaga pemerintah dan manajemen yang cenderung menutupi korupsi di organisasi. (Guntara, 2020).
6. Sistem peradilan yang tidak sempurna (*Imperfect justice system*), Sistem keadilan yang tidak sempurna juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan korupsi. Peradilan di Indonesia, termasuk peradilan untuk tindak pidana korupsi, mengadopsi prinsip praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah berfokus pada seseorang yang akan diperiksa, ditangkap, dan diadili melalui proses yang panjang dan rumit. Bukti awal yang cukup harus mendahului proses tersebut dan pihak yang mencari bukti awal adalah penyidik. Namun demikian, untuk sampai ke pengadilan, seseorang harus menyelesaikan persyaratan dan berkas, jumlahnya bisa mencapai ratusan. Proses penyelesaian berkas dan data membutuhkan waktu yang lama. Berkas yang telah tiba di tangan jaksa bisa dikembalikan berkali-kali ke polisi untuk melengkapi berkas dan fakta. Melengkapi berkas dan fakta sering dilakukan karena jaksa berpikir bahwa yang diberikan masih belum lengkap. Kondisi seperti itu sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku "membantu" untuk menghindari proses hukum. Orang-orang ini disebut mafia hukum atau mafia peradilan.
7. Sistem pengadaan barang dan jasa (*Goods and services procurement system*), Salah satu sektor yang rentan terhadap korupsi adalah pengadaan barang dan jasa di suatu lembaga atau departemen. Sebagai contoh, mantan gubernur Aceh, Abdullah Puteh, pernah tertangkap dalam kasus korupsi dalam pengadaan helikopter untuk pemerintah daerah Aceh. Akibatnya, Abdullah Puteh dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

8. Kesenakahan dan kesempatan (*Greed and opportunity*). Kesenakahan dan peluang bisa menjadi salah satu penyebab korupsi. Budaya konsumtif masyarakat bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan korupsi merajalela di negara ini. Saat ini, seseorang sering dinilai dan dihormati bukan dari perilaku dan prestasinya tetapi dari penampilan dan barang yang ia kenakan.

Era Digitalisasi 5.0 dan Sosial Media

Di era Digitalisasi 5.0 teknologi semakin maju pada tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan masyarakat adalah beradaptasi dengan era baru. Society 5.0 adalah konsep sosial yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi, di mana orang diharapkan memecahkan masalah yang kompleks dengan memanfaatkan teknologi mutakhir (Campus, 2023). Salah satu kemajuan teknologi yang paling signifikan di abad ini adalah munculnya media sosial yang telah menjadi sumber informasi tanpa henti tentang kehidupan sehari-hari masyarakat. Media sosial berfokus pada jenis komunikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan mendiskusikan informasi dan ide dalam komunitas virtual (Kirana, 2023). Media sosial menjadi semakin penting di era digitalisasi 5.0, khususnya di bidang pemasaran. Dengan pergeseran dari pemasaran tradisional ke pemasaran digital, media sosial telah menjadi alat penting bagi bisnis untuk menjangkau audiens target mereka dan mempromosikan produk dan layanan mereka (Sitanggang, 2023). Selain itu, media sosial juga telah menjadi platform penting bagi individu untuk terhubung dengan orang lain, berbagi pengalaman, dan mengungkapkan pendapat mereka. Alhasil, media sosial menjadi kekuatan yang dahsyat dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi gerakan sosial dan politik (Media Online Di Era Revolusi Industry 4.0 Dan Society 5.0, 2023). Di era digitalisasi 5.0, media sosial tidak hanya penting untuk bisnis dan individu tetapi juga untuk pendidikan. Media sosial dapat membantu siswa mengembangkan kreativitasnya dan memajukan kualitas sumber daya manusia (Arsanti, 2022). Selain itu, media sosial telah menjadi alat penting untuk komunikasi, belanja, dan hiburan, menjadikannya bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat (William Ramdhan, 2021). Dengan demikian, media sosial memiliki peran yang signifikan di era digitalisasi 5.0, dan pengaruhnya kemungkinan akan terus berkembang di masa mendatang. Media sosial telah menjadi bagian integral dari digitalisasi 5.0 menawarkan banyak keuntungan bagi individu dan bisnis. Salah satu keuntungan paling signifikan dari media sosial adalah peningkatan konektivitas dan komunikasi (Sugiono, 2020).

Era digitalisasi 5.0 dan sosial media memiliki peran penting dalam penanganan korupsi. Pemimpin yang mampu memahami konsep digitalisasi 5.0 dan memanfaatkan sosial media dengan baik dapat menjadi faktor pendorong dalam mengakselerasi penanganan korupsi. Konsep digitalisasi 5.0 menekankan pada penggunaan teknologi dan inovasi yang dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Pemimpin yang mampu memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk mengatasi masalah kompleks dan menjadi kreatif dalam menghadapi permasalahan dapat menjadi kunci dalam pengembangan penanganan korupsi (Cahyarini, 2021). Oleh karena itu, pemimpin yang memiliki pemahaman yang baik tentang era digitalisasi 5.0 dan kemampuan dalam memimpin inovasi dapat menjadi kunci dalam mengakselerasi penanganan korupsi. Sosial media juga memiliki peran penting dalam penanganan korupsi. Sosial media dapat mempercepat penyebaran informasi dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam memberantas korupsi. Pemimpin yang mampu memanfaatkan sosial media dengan baik dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi. Selain itu, pemimpin yang dinamis dan mampu memanfaatkan teknologi dalam memimpin inovasi dapat memanfaatkan sosial media sebagai alat untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi (Natalia, 2019)

Kepemimpinan yang kolaboratif dan inklusif juga memiliki peran penting dalam mengakselerasi penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan sosial media. Sebagaimana dijelaskan oleh Cahyarini dalam penelitiannya, transformasi digital membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemimpin dan anggota organisasi. Dalam penanganan korupsi, kolaborasi antara pemimpin, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat diperlukan. Selain itu, media massa juga dapat berperan sebagai alat untuk membentuk persepsi publik mengenai pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pemimpin yang kolaboratif dan inklusif harus mampu membangun kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait dan memanfaatkan media massa dengan bijak untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan sosial media.

Kepemimpinan yang visioner dan strategis memainkan peran penting dalam mengakselerasi penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan sosial media. Sebagaimana dijelaskan oleh Margaretha Hanita dalam bukunya "Kepemimpinan strategi di era digital leadership untuk ketahanan nasional", peran kepemimpinan dalam transformasi digital sangat krusial (HANITA, 2022). Kepemimpinan yang visioner dan strategis mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di era digitalisasi 5.0 dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempercepat

penanganan korupsi. Kepemimpinan yang transparan dan akuntabel juga menjadi faktor penting dalam mengakselerasi penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan sosial media. Sebagaimana dijelaskan oleh Tulungen et al. dalam penelitiannya, pemimpin yang transparan dan akuntabel mampu membangun kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan korupsi (Evans E.W. Tulungen, 2022). Dalam era society 5.0, gaya kepemimpinan demokratis dan *laissez faire* sebaiknya digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan korupsi (Imtinan, 2021). Oleh karena itu, pemimpin yang transparan dan akuntabel harus mampu memberikan akses informasi yang mudah dan terbuka kepada publik, serta bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam penanganan korupsi.

Mengakselerasi penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan sosial media merupakan tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut meliputi aspek teknologi dan sosial media, yang dapat menjadi sarana bagi korupsi untuk berkembang. Kepemimpinan dan kebijakan juga menjadi tantangan dalam mengakselerasi penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan sosial media. Peran kepemimpinan dalam transformasi digital menjadi faktor kunci bagi keberhasilan suatu organisasi dalam menghadapi tantangan era digitalisasi 5.0 (BDK Jakarta Kementerian Agama RI, 2020). Kepemimpinan dan kebijakan juga menjadi tantangan dalam mengakselerasi penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan sosial media. Peran kepemimpinan dalam transformasi digital menjadi faktor kunci bagi keberhasilan suatu organisasi dalam menghadapi tantangan era digitalisasi 5.0. Oleh karena itu, dibutuhkan kepemimpinan yang dinamis dan mampu memanfaatkan teknologi secara optimal untuk mengakselerasi penanganan korupsi. Selain itu, tantangan dalam mengakselerasi penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan sosial media juga meliputi aspek budaya dan kesadaran masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak hanya terkait dengan penindakan dan pencegahan korupsi, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi dan membangun budaya antikorupsi di masyarakat (Azhar, 2008).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran kepemimpinan yang mampu memanfaatkan teknologi dan membangun budaya antikorupsi menjadi sangat penting. Kepemimpinan digital dapat menjadi kunci dalam transformasi digital dan mengakselerasi penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan sosial media. Selain itu, diperlukan juga kebijakan yang tepat dan efektif untuk mengatasi tantangan dalam mengakselerasi penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan sosial media.

Dalam hal ini, penguatan reformasi birokrasi dan budaya antikorupsi menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut (Andika Yasa, 2021).

Metode

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dokumen untuk menggambarkan situasi yang sedang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dokumen atau teks, di mana bahan tertulis dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan konteksnya. Dalam konteks topik yang dikaji, yaitu "Peran Kepemimpinan dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi di Era Digitalisasi 5.0 dan Sosial Media", metode dan teknik ini digunakan untuk mengkaji tingkat keterbacaan teks-teks yang terkait dengan topik tersebut atau untuk menentukan tingkat pemahaman yang dicapai terhadap topik tersebut dari teks-teks yang relevan. Penting bagi peneliti untuk memastikan bahwa naskah-naskah yang digunakan autentik agar memperoleh kredibilitas yang tinggi dalam penelitian ini (Tedi Priatna, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Di era digitalisasi 5.0 dan media sosial, peran kepemimpinan sangat penting dalam mengakselerasi penanganan korupsi. Kepemimpinan yang dinamis dan mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dapat menjadi faktor kunci bagi keberhasilan suatu organisasi dalam menghadapi tantangan era digitalisasi 5.0. Pemimpin yang mampu memahami konsep digitalisasi 5.0 dan memanfaatkan media sosial dengan baik dapat menjadi faktor pendorong dalam mengakselerasi penanganan korupsi. Selain itu, kepemimpinan yang kolaboratif dan inklusif juga memiliki peran penting dalam mengakselerasi penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan media sosial. Transformasi digital membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemimpin dan anggota organisasi. Dalam penanganan korupsi, kolaborasi antara pemimpin, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat diperlukan.

Pemimpin yang kolaboratif dan inklusif harus mampu membangun kerja sama yang baik dengan semua pihak terkait dan memanfaatkan media massa dengan bijak untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan media sosial. Kepemimpinan yang visioner dan strategi juga memainkan peran penting dalam mengakselerasi penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan media sosial. Pemimpin visioner dan strategis mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di era digitalisasi 5.0 dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempercepat

penanganan korupsi. Kepemimpinan yang transparan dan akuntabel juga menjadi faktor penting dalam mengakselerasi penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan media sosial.

Peran Kepemimpinan Yang Efektif Dan Berintegritas Dalam Mengatasi Korupsi Di Era Digitalisasi 5.0 Dan Media Sosial

Dalam era digitalisasi 5.0 dan media sosial, kepemimpinan yang efektif dan berintegritas memiliki peran penting dalam mengatasi korupsi. Kepemimpinan yang kolaboratif dan inklusif dapat membangun kerjasama yang baik antara pemimpin, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi korupsi. Selain itu, media massa juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membentuk persepsi publik mengenai pemberantasan korupsi. Kepemimpinan yang visioner dan strategis dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi di era digitalisasi 5.0 dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempercepat penanganan korupsi. Kepemimpinan yang transparan dan akuntabel dapat membangun kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan korupsi.

Dalam era society 5.0, gaya kepemimpinan demokratis dan laissez faire sebaiknya digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan korupsi. Selain itu, kepemimpinan yang efektif dan berintegritas juga dapat membangun tim yang solid dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama dari suatu organisasi atau masyarakat. Membangun tim yang solid melibatkan identifikasi keanggotaan dan kerjasama yang kuat di antara anggota. Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif dan berintegritas dapat memainkan peran penting dalam mengatasi korupsi di era digitalisasi 5.0 dan media sosial dengan membangun kerjasama yang baik, mengantisipasi perubahan, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun tim yang solid.

Peran Kepemimpinan Organisasi Dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi Di Era Digitalisasi 5.0 Dan Media Sosial

Kepemimpinan dalam institusi dapat memainkan peran penting dalam mengakselerasi penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan media sosial dengan mengambil beberapa langkah berikut:

1. Membangun budaya integritas: Kepemimpinan dapat membangun budaya integritas di institusi dengan menetapkan standar etika yang tinggi dan memastikan bahwa semua anggota institusi memahami dan mematuhi standar tersebut.

2. Meningkatkan transparansi: Kepemimpinan dapat meningkatkan transparansi dalam institusi dengan memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting tersedia untuk publik dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan transparan.
3. Meningkatkan akuntabilitas: Kepemimpinan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam institusi dengan memastikan bahwa semua anggota institusi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bahwa ada mekanisme untuk melaporkan pelanggaran etika atau korupsi.
4. Menggunakan teknologi: Kepemimpinan dapat menggunakan teknologi untuk mempercepat penanganan korupsi dengan memanfaatkan teknologi seperti big data, analisis prediktif, dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan mencegah korupsi.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Kepemimpinan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan korupsi dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk melaporkan pelanggaran etika atau korupsi.

Kepemimpinan dalam institusi dapat memainkan peran penting dalam mengakselerasi penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan media sosial dengan membangun budaya integritas, meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, menggunakan teknologi, dan mening.

Tantangan Utama Dalam Penanganan Korupsi Yang Muncul Seiring Dengan Perkembangan Digitalisasi Dan Media Sosial, Serta Bagaimana Kepemimpinan Dapat Menghadapinya

1. Kompleksitas teknologi: Perkembangan teknologi yang pesat dapat memudahkan pelaku korupsi untuk melakukan tindakan korupsi secara lebih canggih dan sulit dideteksi. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang mampu memahami konsep digitalisasi 5.0 dan memanfaatkan teknologi dengan baik untuk mengatasi masalah kompleks dan menjadi kreatif dalam menghadapi permasalahan.
2. Penyebaran informasi yang cepat: Media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas. Namun, hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menyebarkan informasi palsu atau menghalangi informasi yang benar. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang mampu memanfaatkan media sosial dengan baik untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi.

3. Budaya dan kesadaran masyarakat: Pemberantasan korupsi tidak hanya terkait dengan penindakan dan pencegahan korupsi, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi dan membangun budaya antikorupsi di masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kepemimpinan dapat mengambil beberapa langkah, antara lain:

1. Membangun budaya integritas: Kepemimpinan dapat membangun budaya integritas di institusi dengan menetapkan standar etika yang tinggi dan memastikan bahwa semua anggota institusi memahami dan mematuhi standar tersebut.
2. Meningkatkan transparansi: Kepemimpinan dapat meningkatkan transparansi dalam institusi dengan memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting tersedia untuk publik dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan.

Simpulan

Dalam era digitalisasi 5.0 dan media sosial, kepemimpinan yang efektif dan berintegritas memiliki peran penting dalam mengatasi korupsi. Kepemimpinan yang kolaboratif dan inklusif dapat membangun kerjasama yang baik antara pemimpin, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi korupsi. Media massa juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membentuk persepsi publik mengenai pemberantasan korupsi. Kepemimpinan yang visioner dan strategis dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi di era digitalisasi 5.0 dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempercepat penanganan korupsi. Kepemimpinan yang transparan dan akuntabel dapat membangun kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan korupsi.

Kepemimpinan dalam institusi dapat memainkan peran penting dalam mengakselerasi penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0 dan media sosial dengan mengambil beberapa langkah berikut: Membangun budaya integritas dengan menetapkan standar etika yang tinggi; Meningkatkan transparansi dengan memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia untuk publik; Meningkatkan akuntabilitas dengan memastikan bahwa semua anggota institusi bertanggung jawab atas tindakan mereka; Menggunakan teknologi seperti big data, analisis prediktif, dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan mencegah korupsi;

Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Tantangan utama dalam penanganan korupsi yang muncul seiring dengan perkembangan digitalisasi dan media sosial meliputi kompleksitas teknologi, penyebaran informasi yang cepat, serta budaya dan kesadaran masyarakat. Kepemimpinan yang efektif dapat menghadapi tantangan ini melalui langkah-langkah seperti membangun budaya integritas, meningkatkan transparansi, serta memanfaatkan teknologi dan media sosial.

Referensi

- Abeng, T. D. E., Pawero, A. M. D., & Ramli, A. (2021). Strategi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Dalam Menanamkan Nilai-nilai Kedisiplinan Siswa SMP Muhammadiyah Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Journal of Islamic Education Leadership*, 1(1), 40–59.
- Andika Yasa, S. M. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintah* Vol. 20 No. 01, 27-42.
- Arsanti, A. W. (2022). Media Sosial Pendukung No 1 Pembelajaran Di Era Society 5.0. *Prosiding Senada (Seminar Nasional Daring)*, 1-6.
- Azhar, A. (2008). Upaya Pemberantasan Korupsi Seiring Kemajuan Teknologi Informasi. *Legislasi Indonesia* Vol. 5 No. 4, 1-7. Retrieved from Hukum Teknologi Informasi [Telematika].
- Bashori, Z. I. (2020). Peran Kepemimpinan Di Lembaga Pendidikan Islam. *Produ: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 2, Nomor 1, 1-12.
- BDK Jakarta Kementerian Agama RI. (2020, Agustus 03). *Teknologi Pendidikan Era Digital Dan Tantangan Indonesia Menghadapi Dinamika Peradaban Milenium Sebagai Era Robotic*.
- Cahyarini, F. D. (2021). Implementasi Digital Leadership Dalam Pengembangan Kompetensi Digital Pada Pelayanan Publik. *Studi Komunikasi Dan Media*, 1-14.
- Campus, Q. (2023, Juni 1). *Society 5.0 Definisi dan Pengertiannya*. Retrieved from campus.quipper.com: <https://campus.quipper.com/kampuspedia/society-5-0>
- Dewi, E. (2006). Menggagas kriteria pemimpin Ideal. AK Group.
- Evans E.W. Tulungen, D. P. (2022). Transformasi Digital: Peran Kepemimpinan Digital. *Jurnal EMBA* Vol. 10 No. 2, 1-8.
- Faiki, L. O. (2021). Corruption In Indonesia (Factor Analysis and Efforts That Need To Be Done). *Journal Philosophy Of Law* Volume 2 Nomor 2, 1-10.

- Fransisco, W. (2020). Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kebijakan Dan Tantangan Penanggulangan Korupsi Di Era 4.0. *Hukum Samudra Keadilan Volume 15, Nomor 1*, 1-18.
- Gaol, N. T. (2020). Teori Kepemimpinan: Kajian Dari Genetika Sampai Skill. *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 5, Nomor 2*, 1-15.
- Gunawan, H. P. (2020). Corruption in Indonesia (Is It Right to Governance, Leadership and It to Be Caused?). *Journal of Economics and Sustainable Development Vol.11, No.2*, 1-10.
- Hafiz Sandeq Yusuf, I. A. (2022). Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam. *Agama, Sosial, dan Budaya (Religion) Vol.1, No.6*, 1-12.
- HANITA, M. (2022). *Kepemimpinan strategi di era digital leadership untuk ketahanan nasional*. Lemhannas RI.
- Hartono, D. M. (2020). Effective Leadership: From The Perspective of Trait Theory and Behavior Theory. *REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen) Vol 4 No 1*, 1-11.
- Hidayanto, M. F. (2005). Kepemimpinan Dan Korupsi (Simbiosis Mutualisme). *Al-Mawarid Edisi XIII*, 1-10.
- Imtinan, N. F. (2021). Gaya Kepemimpinan Dalam Menghadapi Era Society 5.0. *Jurnal Kependidikan Islam Volume 11, Nomor 2*, 1-9.
- Jamaluddin. (2006). Pengaruh Fungsi Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja. *Office. Vol.2 No. 1*.
- Kirana, A. M. (2023, Juni 1). *Smart Society 5.0: Mewujudkan Masyarakat Ideal di Era Digital*. Retrieved from kumparan.com: <https://kumparan.com/adinyarani-mk/smart-society-5-0-mewujudkan-masyarakat-ideal-di-era-digital-1zKoFjjM8ij>
- Media Online Di Era Revolusi Industry 4.0 Dan Society 5.0*. (2023, Juni 1). Retrieved from <https://humas.paserkab.go.id/>
- Natalia, D. L. (2019). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (2)*, 57-73, 1-17.
- Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Mercatoria, 13 (2)*, 1-21.
- Sitanggang, D. D. (2023, Juni 1). *Society 5.0 Adalah : Pengertian dan Penerapannya*. Retrieved from Detikcom: <https://www.detik.com/bali/berita/d-6461103/society-50-adalah-pengertian-dan-penerapannya>
- Sofyanoor, A. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sibatik Journal | Volume 1 NO.2*, 1-10.

- Sugiono, S. (2020). Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0. *IPTEK-KOM(Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)* Vol. 22 No. 2, 1-17.
- Syahril, S. (2019). Teori-Teori Kepemimpinan. *Ri'ayah*, Vol. 04, No. 02, 1-8.
- Tedi Priatna, M. (2017). *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Insan Mandiri.
- Thoha, M. (2007). *Kepemimpinan dalam manajemen*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- William Ramdhan, N. d. (2021). Masyarakat Bijak Dalam Memanfaatkan Sosial Media Di Era Society 5.0. *Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat* Vol. 1 No. 2, 1-6.